IMPLEMENTASI DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Debora Boro Longo

INSTITUT ILMU KESEHATAN STRADA indonesia

deboraborolongo@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum dalam demokrasi di Indonesia suatu hal yang paling mendasar. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Dalam suatu Negara yang berdemokrasi, Implementasi Hak Asasi Manusia merupakan suatu keharusan. Tingkatan implementasi demokrasi dan hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh peran Negara. Implementasi demokrasi dan Hak asasi manusia yang berkedaulatan rakyat merupakan cita-cita yang hendak dicapai.

Kata Kunci : Implemetasi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia

I. PENDAHULUAN

Keberadaan hukum dan Negara dalam konsepsi Negara hukum merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan suatu Negara yang mengukuhkan system ketatanegaraannya sebagai Negara hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari eksistensi hukum dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahan di Negara tersebut. Negara hukum merupakan konsep bernegara yang telah berkembang dari beberapa dekade lalu. Hal ini terbukti dari keberadaan pemikiran mengenai konsep-konsep negara hukum yang telah ada dan berkembang jauh sebelum konsep negara hukum telah tersusun dan tertata seperti saat sekarang ini. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Jimly

Asshiddiqie:

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zamanmewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu

kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (the

philosopher king). Namun, dalam bukunya "the Statesman" dan "the Law", Plato menyatakan

bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (the second best)

yang

menempatkan supremasi hukum. Senada dengan Plato, tujuan

negara menurut Aristoteles

adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (the best life possible)

yang dapat dicapai

dengan supremasi hukum.¹

Tentunya upaya demokratisasi dan kebebasan warga Negara tersebut harus terus

dilakukan pembenahan dan penyempurnaan

dalam menyeimbangkan dan menyelaraskan

dengan tuntutan demokrasi secara kontemporer. Hal ini dikarenakan kebutuhan atas konsepsi

demokrasi tersebut dari waktu ke waktu memang harus selalu disesuaikan dengan

kebutuhan kekinian yang berbasis kepada kepentingan Negara dan warga Negara dan

menciptakan konsep demokrasi dan kebebasan warga Negara ke depan.

Berdasarkan atas latar belakang masalah singkat di atas, maka Penulis tertarik

untuk membahasnya yang dalam hal ini Penulis beri judul: Demokratisasi dan Kebebasan

Warga Negara Suatu Tinjauan Tentang Hukum Tata Negara Ke Depan.

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas, maka agar lebih terfokusnya

penulisan karya ilmiah ini, maka Penulis membatasi pembahasan karya ilmiah ini dengan

rumusan masalah yakni: bagaimana konsep ideal Demokratisasi dan Kebebasan warga

Negara ditinjau dari aspek konseptual Hukum Tata Negara ke depan?

II. PEMBAHASAN

A. Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Konsep Pembangunan dan

Pembaharuan Konsep Hukum

Sebelum mengkaji konsep ideal sehubungan dengan upaya demokratisasi dan

kebebasan warga Negara, maka perlu dikaji dari konsep awal Negara hukumnya itu

sendiri. Tentunya berbica konsep tidak dapat dilepaskan dari definisi sehubungan dengan

Negara hukum tersebut.

Menurut Wiryono Projodikoro, Negara hukum didefinisikan sebagai: "Negara di

mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam

melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang

berlaku".⁴

Sedangkan menurut Muhammad Yamin. Negara hukum didefinisikan sebagai:

"

Suatu Negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-

orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh

badan-badan perwakilan rakyat secara sah sesuai dengan asas the laws and not

menshall govern".⁵

Menurut intinya, berdasarkan pendapat Bahder Johan Nasution:

"esensi

Negara hukum menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan Negara

pada aturan hukum".⁶

Yang dalam kehidupan ketatanegaraan setidaknya secara umum

ada 2 jenis klasifikasi Negara hukum tersebut

Konsep negara hukum modern eropa kontinental

memiliki perbedaan dengan

konsep negara hukum anglo amerika. Untuk eropa kontinental menggunakan istilah

“

rechtsstaat” sedangkan konsep negara hukum anglo amerika menggunakan istilah “The Rule of Law”.

Dalam hal konsep negara hukum ada beberapa hal penting yang mendasar

antara konsep negara hukum eropa continental dan anglo amerika, yaitu:

Konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (nomocratie) yang

berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah

hukum. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah

“rechtsstaat” mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia

2. Pembagian kekuasaan

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang

4. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey

menyebutkan tiga ciri penting “The Rule of Law”, yaitu:

1. Supremacy of Law

2. Due Process of Law.

3. Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan quality Before The Law

III.

PENUTUP.

A. Kesimpulan

1. Dalam hal pemahaman terhadap kebebasan kerap terjadi salah pemahaman terkait

dengan penafsiran HAM, yang mana dalam penafsirannya HAM kerap dipandang

sebagai suatu kebebasan tanpa

batas, selain itu pengaturan mengenai HAM masih

terlalu umum terjabarkan di dalam regulasi peraturan perundang-undangan.

Sehingga berdampak kepada kebebasan tanpa batas dalam berdemokrasi yang

berujung tidak berkualitasnya hasil demokrasi itu sendiri.

2. Demokratisasi dan kebebasan warga Negara sudah harus digulirkan, hal ini untuk

mendemokratiskan kembali kebebasan itu sendiri dan menuju hasil demokrasi yang

berkualitas pula. Konsepnya dalam tataran konseptual hukum tata Negara, perlu

penerjemahan kebebasan yang sesuai dengan kultur dasar Indonesia yang

bersumber dari hukum nasional yang hidup di tengah masyarakat. Sehingga rakyat

berhak mendapatkan pendidikan yang layak, hak beragama sesuai keyakinan, hak

untuk berpendapat, hak berpolitik, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, serta hak

mendapatkan kesejahteraan yang dijamin negara.

B. Saran

1. Dalam penegakan demokrasi hendaknya memperhatikan aspek kebebasan warga

Negara yang terkontrol, sehingga menghasilkan output demokrasi yang

berkesinambungan dan tepat guna.

2. Dalam konsep ketatanegaraan hendaknya Indonesia konsisten menetapkan hukum

tata Negara nasional Indonesia yang sesuai dengan kultur Indonesia tanpa poerlu

mereduksi ataupun mengimplementasikan Hukum Tata Negara dari Negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Bahder

Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia (suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya, penangananannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan administrasi), Peradaban, 2007